



ANALISA KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASER

Agus Munandar¹, Saputra²

^{1,2} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Indonesia

History Article

Article history:

Received July 3, 2023

Approved August 19, 2023

Keywords:

COVID-19,
Financial
Performance, Local
Government
Financial
Statements, Local
Governments,
Financial Ratios.

ABSTRACT

The recent Covid-19 virus outbreak presents new challenges for government agencies to manage their financial performance and financial reporting responsibly. Financial analysis is needed to analyze how the financial position and performance, and evaluate the operational performance of an agency in the future. The impact of this pandemic has also been felt by Paser Regency with a decrease in regional economic growth. The purpose of this research is to understand how operational and financial performance of the local government of the Paser district in the period 2020 to 2021. A descriptive-quantitative approach was used in the research by examining the calculation of the level of financial independence, efficiency, and effectiveness, and also regional operations including the allocation of operating and capital expenditure costs. The data that has been collected is then analyzed using measuring instruments in the form of financial ratios. The results of the study show that Paser Regency is generally in a good financial position, but there are still several financial aspects that must be improved in the coming fiscal year. Paser Regency needs to be more specific in setting revenue targets during the Covid-19 pandemic by observing trends in regional economic development and the possibility of enacting and implementing policies that maximize PAD revenue so that it does not always depend on central government contributions. Then, Paser Regency will be able to reduce operational costs and increase investment costs for the benefit of the community.

ABSTRAK

Wabah virus Covid-19 akhir ini menghadirkan tantangan baru bagi instansi pemerintahan untuk mengelola kinerja keuangannya dan pelaporan keuangan secara bertanggung jawab. Analisa keuangan diperlukan untuk menganalisa bagaimana posisi dan kinerja keuangan, dan mengevaluasi kinerja operasional suatu instansi pada masa mendatang. Dampak dari pandemi ini dirasakan juga oleh kabupaten Paser dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk

memahami bagaimana kinerja operasional dan keuangan di pemerintah daerah kabupaten Paser pada periode tahun 2020 sampai 2021. Pendekatan deskriptif-kuantitatif digunakan dalam penelitian dengan mengkaji perhitungan tingkat kemandirian keuangan, efisiensi dan efektivitas, dan juga operasional daerah meliputi alokasi biaya belanja operasi dan modal. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan alat ukur berupa rasio keuangan. Hasil kajian menunjukkan kabupaten Paser secara umum berada dalam posisi keuangan yang baik, namun masih ada beberapa aspek keuangan yang harus diperbaiki di tahun anggaran mendatang. Kabupaten Paser perlu lebih spesifik dalam menetapkan target pendapatan di masa pandemi Covid-19 dengan mengamati trend perkembangan ekonomi daerah dan kemungkinan memberlakukan dan menerapkan kebijakan yang memaksimalkan penerimaan PAD sehingga tidak selalu bergantung pada kontribusi pemerintah pusat. Kemudian, Kabupaten Paser akan mampu menekan biaya operasional dan menambah biaya investasi untuk kepentingan masyarakat.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: s.sanjaya1005@gmail.com

PENDAHULUAN

Wabah virus Covid-19 yang menyebar luas ke seluruh dunia menyebabkan stabilitas semua sektor masyarakat terganggu. Negara Indonesia juga terkena dampak di seluruh sektor bisnisnya. Wabah virus tersebut di awal tahun 2020 membuat kestabilan perekonomian di seluruh dunia stagnan dan negatif. Langkah yang dilakukan oleh negara Indonesia berupa pembatasan skala besar, berbeda dengan negara-negara lain yang langsung menerapkan penutupan akses keluar dan masuk di negara tersebut. Namun upaya yang diambil Indonesia tersebut diharapkan dapat menekan atau meminimalisir dampak krisis ekonomi (Erlina et al., 2020; Kickbusch et al., 2020). *International Monetary Fund* selaku organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan dan pinjaman, memperkirakan ekonomi global akan menyusut dari sebelumnya sebesar 3,3 persen menjadi minus sebesar 3 persen (Junaedi & Salistia, 2020). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku lembaga di bidang riset terkait penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, memperkirakan negara Indonesia akan mengalami perlambatan dalam pertumbuhan sekitar 2,3 persen, terparah akibat pandemi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar negatif 0,4 persen (Onibala et al., 2021).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan kabupaten Paser mencatat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, turun hingga minus 2,77 persen pada 2020 akibat dampak wabah Covid-19 ini. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen tahun 2020, jika dibandingkan tahun 2019 sekitar 3,97 persen. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup secara drastis, didukung dengan kebijakan pembatasan skala besar yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat negara Indonesia untuk menekan penyebaran penularan virus Covid-19. Selain itu, pandemi ini juga berdampak pada aktivitas pertambangan yang sangat turun, akibatnya berdampak pada pendapatan perusahaan perseroan. Menurunnya pendapatan perseroan menyebabkan turunnya pelaksanaan dana perimbangan dalam bentuk bagi hasil (Kadir, 2022; Mayningrum & Muhtadi, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, seluruh pemerintah daerah di negara Indonesia memiliki hak istimewa untuk penanganan terkait perpajakan, alokasi tindakan-tindakan khusus, dan penyesuaian anggaran dan penggunaan dengan pengawasan Kementerian Keuangan secara langsung. Pandemi ini

menghadirkan tantangan baru bagi instansi pemerintahan untuk mengelola kinerja keuangannya dan melakukan pelaporan keuangan yang bertanggung jawab. Pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah cepat dan tepat sasaran, seperti peninjauan batas defisit dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tambahan belanja APBN di sektor kesehatan, rencana stimulus terkait pemulihan kembali ekonomi nasional Indonesia dan stimulus bagi dunia usaha yang terdampak pandemi ini (Junaedi & Salistia, 2020).

Dampak dari penyebaran virus Covid-19 sendiri dapat diamati dengan menganalisis laporan keuangan daerah (LKD). Analisa dilakukan dengan mengamati LKD untuk menganalisis status kegiatan ekonomi keuangannya serta untuk menilai perkembangan ekonomi daerah kinerja keuangan di tahun-tahun berikutnya. Rasio keuangan menjadi alat analisa keuangan yang biasa digunakan dalam mengukur kinerja keuangan baik instansi perusahaan, perbankan, maupun instansi pemerintahan. Rasio yang biasa dipergunakan dalam menganalisis kinerja laporan keuangan khususnya instansi pemerintahan antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah (PAD), serta rasio operasional atau disebut juga rasio aktivitas yang menggambarkan alokasi dana ke belanja operasi dan modal (Kawatu, 2019). Adanya analisa rasio-rasio keuangan tersebut akan diketahui apakah kinerja keuangan instansi meningkat atau mengalami penurunan serta dapat dibandingkan dengan instansi lain. Selain itu, adanya analisa keuangan dapat menciptakan evaluasi yang baik guna untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang (Amal & Wibowo, 2022).

Dari hasil penelusuran jurnal penelitian mengenai analisa kinerja keuangan pemerintah kabupaten Paser, ditemukan bahwa masih banyak peneliti yang belum melakukan penelitian terkait kinerja keuangan kabupaten Paser. Melihat kajian atau penelitian yang dapat dikatakan relatif sedikit, peneliti mengambil kabupaten Paser menjadi objek penelitian ini dan mengambil periode tahun anggaran 2020 sampai 2021. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Paser selama tahun 2020 sampai 2021 dimana wabah Covid-19 muncul dan menyebar seluas di dunia, terutama di negara Indonesia.

METODE

Berfokus pada Pemerintah kabupaten Paser, peneliti ingin melihat apakah ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di mana wabah virus Covid-19 masih melanda secara global dan menyeluruh. Deskriptif-kuantitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk mengumpulkan informasi-informasi perkembangan kinerja keuangan yang dapat diamati melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan alat ukur berupa rasio keuangan. Pengukuran menggunakan rasio keuangan yang meliputi rasio tingkat kemandirian kabupaten Paser yang dinyatakan oleh berapa total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan total pendapatan daerah dari transfer Pemerintah Pusat serta pendapatan dari Pinjaman. Rasio berikutnya yang digunakan rasio tingkat efektivitas PAD kabupaten Paser, menggambarkan kesanggupan instansi pemerintah dalam merealisasikan PAD yang telah terealisasi dibanding dengan anggaran yang telah ditentukan berlandaskan potensi kabupaten Paser yang sebenarnya.

Rasio efisiensi juga digunakan dalam penelitian ini, di mana rasio tersebut akan memperlihatkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD yang maksimal dan optimal di suatu daerah tertentu. Kemudian rasio terakhir adalah rasio operasional (aktivitas) yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah lebih memprioritaskan alokasi dana pada biaya belanja operasional dan biaya belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data *archival-research*. Metode penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan data sekunder berupa catatan, dokumen, bukti lain tertulis dan laporan histori. Penggunaan data sekunder tersebut bersumber dari LKPD yang dipublikasikan dalam *website* resmi kabupaten Paser periode tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. Detail data keuangan yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah kabupaten Paser untuk tahun

anggaran 2020 sampai 2021, serta data yang berasal dari sumber lain sebagai data tambahan untuk menganalisis kinerja keuangan kabupaten Paser.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Tingkat Kemandirian

Tingkat kemandirian keuangan di LKPD kabupaten Paser dapat diukur dengan menetapkan rumus sebagai berikut.

Formula 1. Rumus Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Transfer\ +\ Pinjaman} \times 100\%$$

Table 1. Parameter/Model Hubungan Kemandirian Daerah

Tingkat Mandiri Daerah (%)	Parameter
0 sampai 25	Rendah Sekali
25 sampai 50	Rendah
50 sampai 75	Sedang
75 sampai 100	Tinggi

Sumber: diolah oleh peneliti

Rasio tingkat kemandirian menunjukkan sejauh mana kesanggupan suatu instansi daerah mendukung penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan, juga pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban mereka dalam hal membayar pajak dan retribusi. Hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan di kabupaten Paser ditunjukkan pada Tabel 2.

Table 2. Analisa Tingkat Kemandirian Keuangan TA 2020-2021

	Tahun Anggaran	
	2020	2021
Pendapatan Riil Daerah (Rp)	173,315,327,565.13	270,129,905,978.22
Pendapatan dr Transfer (Rp)	2,182,811,359,242.00	1,913,090,027,703.00
Pendapatan dr Pinjaman (Rp)	-	-
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%)	7.94	14.12
Model / Parameter	Instruktif	Instruktif

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan kemandirian keuangan, menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Paser dari tahun 2020 hingga tahun 2021 selama masa pandemi mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PAD sebesar Rp 173.315.327.565,13. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 270.129.905.978,02. Dilihat dari tingkat kemandirian keuangan kabupaten Paser tahun 2020 sampai 2021 secara berturut-turut adalah sebesar 7,94 persen dan 14,12 persen. Dapat disimpulkan bahwa kabupaten Paser termasuk ke dalam model hubungan yang instruktif atau rendah sekali, karena ada dalam kisaran 0-25 persen. Hal ini menunjukkan selama masa pandemi Covid-19, pemerintah pusat masih dominan berperan dalam ekonomi daerah dan kabupaten Paser masih belum mampu secara mandiri menjalankan otonomi

daerah secara mandiri disertai dengan partisipasi masyarakat yang rendah dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran pajak serta retribusi daerah yang menjadi pemasukan utama dalam PAD.

Rasio Tingkat Efektivitas

Dalam menghitung rasio tingkat efektivitas PAD di kabupaten Paser ditetapkan rumus sebagai berikut.

Formula 2. Rumus Rasio Tingkat Efektivitas

$$\text{Efektivitas Keuangan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Table 3. Parameter Rasio Tingkat Efektivitas

Tingkat Efektivitas (%)	Parameter
Diatas 100	Sangat Efektif
90 sampai 100	Efektif
80 sampai 90	Cukup Efektif
60 sampai 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber: diolah oleh peneliti

Rasio tingkat efektivitas menjelaskan kemampuan instansi pemerintah daerah dalam mencapai target realisasi PAD, setelah itu dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui berdasarkan potensi nyata daerah. Hasil perhitungan dari tingkat efektivitas keuangan kabupaten Paser dapat dilihat di Tabel 4.

Table 4. Analisa Rasio Tingkat Efektivitas TA 2020-2021

	Tahun Anggaran	
	2020	2021
Realisasi PAD (Rp)	173,315,327,565.13	270,129,905,978.22
Anggaran PAD (Rp)	136,428,440,931.23	165,495,630,000.00
Tingkat Efektivitas (%)	127.04	163.22
Model / Parameter	sangat efektif	sangat efektif

Sumber: diolah oleh peneliti

Mencermati hasil dari rasio tingkat efektivitas kabupaten Paser, dapat diketahui total PAD dalam kurun periode 2020 sampai 2021 masing-masing sebesar 127,04 persen dan 163,22 persen. Berdasarkan Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah, menggambarkan tingkat efektivitas kabupaten Paser dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah yang termasuk ke dalam sumber primer dari PAD pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 memiliki kecenderungan sangat efektif sehingga kabupaten Paser perlu mempertahankan bahkan lebih ditingkatkan kembali di tahun anggaran berikutnya.

Rasio Tingkat Efisiensi

Rasio tingkat efisiensi keuangan pada LKPD kabupaten Paser dihitung dengan menerapkan rumus sebagai berikut.

Formula 3. Rumus Rasio Efisiensi

$$Efisiensi\ Keuangan = \frac{Biaya\ Pemungutan\ PAD}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Table 5. Parameter Rasio Efisiensi

Tingkat Efisiensi (%)	Parameter
Diatas 100	Tidak Efisien
90 sampai 100	Kurang Efisien
80 sampai 90	Cukup Efisien
60 sampai 80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

Sumber: diolah oleh peneliti

Rasio efisiensi menjelaskan terkait selisih antara jumlah biaya yang telah dikorbankan dengan realisasi pendapatan atau penghasilan yang telah didapatkan oleh pihak instansi. Hasil dari perhitungan tingkat efisiensi pada Kabupaten Paser dapat dilihat pada Tabel 6.

Table 6. Analisa Rasio Efisiensi TA 2020-2021

	Tahun Anggaran	
	2020	2021
Biaya Pemungutan PAD (Rp)	2,054,270,681,863.78	2,363,166,913,337.24
Realisasi PAD (Rp)	173,315,327,565.13	270,129,905,978.22
Tingkat Efisiensi (%)	1,185.28	874.83
Model / Parameter	<i>tidak efisien</i>	<i>tidak efisien</i>

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan perhitungan diatas terlihat rasio tingkat efisiensi kabupaten Paser periode tahun 2020 sampai 2021 masing-masing sebesar 1.185,28 persen dan 874,83 persen. Berdasarkan pedoman penilaian efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 kinerja keuangan kabupaten Paser berada pada interval lebih dari 100 persen yang menunjukkan kinerja kurang efisien di tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi PAD kabupaten Paser dapat dikatakan tidak efisien ketika biaya untuk mencapai PAD tersebut cukup tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima daerah.

Rasio Operasional

Rasio operasional atau dikenal rasio aktivitas pada kabupaten Paser dihitung dengan menerapkan rumus sebagai berikut.

Formula 4. Rumus Rasio Operasional

$$(a) \text{ Persentase Belanja Operasi} = \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

$$(b) \text{ Persentase Belanja Modal} = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Pengalokasian dana pada pembiayaan belanja operasional dan modal secara optimal dapat memaparkan bagaimana suatu instansi pemerintah daerah memberikan prioritas utama kepada pembelanjaan operasional dan modal. Hasil perhitungan dari Rasio aktivitas keuangan pada kabupaten Paser dapat dilihat di Tabel 7.

Table 7. *Analisa Rasio Aktivitas TA 2020-2021*

	Tahun Anggaran	
	2020	2021
Operasional (Rp)	1,412,973,358,973.31	1,677,435,644,149.44
Modal (Rp)	571,330,520,756.47	447,277,558,379.80
Total Belanja Daerah (Rp)	2,054,270,681,863.78	2,363,166,913,337.24
Rasio Belanja Operasi (%)	68.78	70.98
Rasio Belanja Modal (%)	27.81	18.93

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan dengan hasil perhitungan rasio operasi, terlihat bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2021 pemerintah kabupaten Paser telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk belanja operasional sehingga rasio tingkat biaya belanja modal terhadap keseluruhan biaya belanja daerah masih cukup rendah. Secara rata-rata dalam 2 tahun tersebut, tingkat rasio biaya belanja operasi kabupaten Paser sebesar 69,88 persen lebih tinggi dari rata-rata rasio biaya belanja modal sebesar 23,37 persen. Disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat aktivitas, selama pandemi Covid-19 pemerintah kabupaten Paser lebih mengutamakan belanja operasional dibandingkan untuk pengeluaran belanja modal. Untuk itu, pemerintah kabupaten Paser perlu melakukan penghematan dalam hal Belanja Pegawai dan lebih didistribusikan untuk kebutuhan belanja modal dan kepentingan masyarakat umum, berkenaan dengan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana umum bagi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat kabupaten Paser.

Hasil analisa rasio keuangan pada LKPD kabupaten Paser periode tahun 2020 sampai 2021 secara ringkas sebagai berikut.

Table 8. *Ringkasan Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Paser*

No.	Nama Rasio Pengukuran	Th 2020 (%)	Th 2021 (%)
1	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	7.94 <i>(instruktif)</i>	14.12 <i>(instruktif)</i>
2	Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah	127.04 <i>(sangat efektif)</i>	163.22 <i>(sangat efektif)</i>
3	Tingkat Efisiensi	1,185.28 <i>(tidak efisien)</i>	874.83 <i>(tidak efisien)</i>
4a	Belanja Operasi	68.78	70.98
4b	Belanja Modal	27.81	18.93

Sumber: diolah oleh peneliti

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa perhitungan rasio keuangan kabupaten Paser, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah khususnya kinerja keuangan kabupaten Paser tahun 2020 sampai 2021 seiring merebaknya wabah virus Covid-19 dalam kondisi bagus (baik), tetapi masih banyak ruang untuk perbaikan dan peningkatan di tahun anggaran mendatang. Pemerintah Kabupaten Paser perlu lebih jeli dan sistematis dalam menetapkan target pendapatan daerahnya sendiri di saat pandemi virus Covid-19 ini dengan memperhatikan perkembangan ekonomi daerah dan kemungkinan implementasi dan penerapan kebijakan dapat meningkatkan

kapasitas optimalisasi PAD agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Paser harus lebih berimbang dalam pengalokasian anggarannya dengan menekan biaya operasional dan meningkatkan belanja modal untuk kepentingan masyarakat.

Kabupaten Paser harus terus membina, mempertahankan dan meningkatkan seluruh indikator kinerja keuangan di daerahnya. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, lebih mengefektifkan PAD dan juga lebih mengefisienkan PAD, dan harmonisasi belanja operasional dan belanja modal. Keterbatasan penelitian ini, peneliti tidak menganalisis pengungkapan peran Kabupaten Paser dalam pengelolaan APBD selama wabah Covid-19 dan tidak memasukkan periode tahun anggaran 2022 di mana wabah mulai mengurangi tingkat penyebaran karena keterbatasan data yang tersedia. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mencakup rasio keuangan lain seperti desentralisasi keuangan dan tingkat pertumbuhan yang tidak peneliti masukkan saat menganalisis rasio dalam penelitian ini, dan dapat mencakup peran Kabupaten Paser dalam pengelolaan APBD selama pandemi covid-19 saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Erlina, Muda, I., & Nasution, D. A. D. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212–224. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 995–1115).
- Kadir, A. A. (2022). *Terpukul Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Paser Tahun 2020 Minus 2,77 Persen*. PusaranMedia.Com. <https://pusaranmedia.com/read/8574/terpukul-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-paser-tahun-2020-minus-277-persen>
- Kawatu, F. S. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. In *Yogyakarta: Deepublish*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kickbusch, I., Leung, G. M., Bhutta, Z. A., Matsoso, M. P., Ihekweazu, C., & Abbasi, K. (2020). Covid-19: How a virus is turning the world upside down. *The BMJ*, 369(April), 10–12. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1336>
- Mayningrum, S., & Muhtadi, K. (2021). i-SMARTS: Digitalization of Agrotechnopreneurship-Based MSME Development to Support Acceleration of East Java Economic Recovery in The Middle of The Covid-19 Pandemic. *East Java Economic Journal*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v5i1.56>
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/view/35097/32880>